

## SANTET BANYUWANGI: THE STRUGGLE BETWEEN STIGMA AND CULTURE POST-REFORMATION 1998

Santet Banyuwangi: Pertarungan Antara Stigma dan Budaya Pasca-Reformasi 1998

Muhammad Agung Pramono Putro <sup>1a(\*)</sup>, Guruh Prasetyo <sup>2b</sup>, Jefri Rieski Triyanto <sup>3c</sup>

<sup>123</sup>Universitas Jember, Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Kecamatan Sumbersari  
Kabupaten Jember, Jawa Timur.

<sup>a</sup>[agungpp@unej.ac.id](mailto:agungpp@unej.ac.id)

<sup>b</sup>[gprasetyo05@unej.ac.id](mailto:gprasetyo05@unej.ac.id)

<sup>c</sup>[jefririeski@unej.ac.id](mailto:jefririeski@unej.ac.id)

(\*)Corresponding Author:  
[agungpp@unej.ac.id](mailto:agungpp@unej.ac.id)

**How to Cite:** Putro, M.A.P., Prasetyo, A., & Triyanto, J.R. (2026). Santet Banyuwangi: The Struggle Between Stigma and Culture Post-Reformation 1998. doi: [10.36526/js.v3i2.7872](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.7872)

Received : 23-04-2026  
Revised : 30-05-2026  
Accepted : **27-06-2026**

### Keywords:

Withcraft (Santet) of Banyuwangi,  
Stigma, Culture,  
Ninja Phenomenon,  
Post-Reformasi Indonesia

### Abstract

The violence directed against alleged practitioners of witchcraft (*santet*) in Banyuwangi in 1998 resulted in a significant loss of life and left a lasting stigma on *santet*, which had long been embedded in the everyday cultural practices of the Osing community. This incident transformed the meaning of *santet* and contributed to its use as a subject of ridicule toward the Osing people of Banyuwangi. This study aims to examine Banyuwangi *santet* as an arena of contestation between social stigma and local cultural roots. Employing the historical method and drawing upon a socio-cultural methodological framework, this research reconstructs *santet* both as an element of intangible cultural heritage and as a historical phenomenon associated with the witchcraft and "ninja" violence that emerged in Banyuwangi during the post-Reformasi period. The findings indicate that the *santet* issue originated from a complex horizontal conflict that generated widespread social unrest at the grassroots level and later evolved into a vertical conflict characterized by allegations that the perpetrators of the violence were hired assassins referred to as "ninjas." The novelty of this study lies in its analysis of these dynamics while simultaneously contributing recommendations for culturally based reconciliation and trauma recovery as preventive measures against the recurrence of similar incidents in communities that remain vulnerable to rumors and cultural violence. Furthermore, the study demonstrates that the unresolved legal status of this tragedy illustrates how stigma can reinforce collective violence, while the culture of *santet* itself is often misunderstood despite representing a complex form of local cultural heritage and wisdom.

### PENDAHULUAN

Stigma terhadap santet menjadi lebih kuat, ketika istilah santet Banyuwangi keluar dari konteks budaya lokal dan masuk ke dalam lingkungan rumor, pelabelan sosial, dan kekerasan kolektif, terutama pasca krisis 1998 (Saputra, 2001). Latar belakang tersebut kemudian berkaitan dengan latar belakang historis dan kultur masyarakat Banyuwangi. Dalam historiografi Banyuwangi, transformasi ke arah masyarakat Banyuwangi yang mayoritas beragama Islam terjadi melalui perundingan panjang antara kekuasaan kolonial, islamisasi politik, dan kekuatan budaya lokal yang tetap ada dalam identitas Osing (Margana, 2012). Ilmu santet dipahami masyarakat sebagai bagian dari pengetahuan spiritual yang melekat. Peralihan masyarakat sebagai pemeluk agama Hindu menjadi pemeluk agama Islam terjadi di masa berakhirnya Kerajaan Blambangan. Islamisasi Blambangan kuat dengan stigma Islamisasi Kompeni (Margana, 2012). Karena, Islamisasi tersebut kental dengan usaha politik VOC mengintervensi Kerajaan Blambangan hingga keruntuhannya.

Ilmu santet Banyuwangi semakin dikembangkan usai perang Puputan Bayu yang sudah mengakibatkan penduduk Banyuwangi yang awalnya berjumlah 60.000 orang menyisakan hanya 5.000 penduduk (Ali, 2002). Dalam Serat Jenang dijelaskan bahwa untuk melanjutkan keturunannya, masyarakat Banyuwangi melakukan rekayasa perkawinan tertutup di antara kerabat sendiri (Partaningrat, 1995). Rekayasa perkawinan tersebut menggunakan santet dalam tradisi gredohan yang mempertemukan calon pria dan wanita di *warung bathokan*. Dalam situasi seperti ini, mantra, pengasihan, dan praktik gaib dapat dianggap sebagai bagian dari kontinuitas budaya yang bertahan meskipun struktur politik dan keagamaan berubah dengan kebutuhan untuk membangun kembali tatanan sosial setelah konflik (Halim, 2019). Oleh karena itu, santet di Banyuwangi tidak selalu dianggap sebagai alat yang menghancurkan, dalam beberapa tradisi, itu juga dianggap sebagai sarana pengasihan, pengikat hubungan, dan simbol ikatan sosial. Ini harus dipikirkan dengan cermat sebagai bagian dari ingatan budaya, bukan sebagai generalisasi tunggal atas semua praktik santet di Banyuwangi (Saputra, 2001).

Stigma kesaktian dan ilmu santet kemudian bertalian dengan identifikasi identitas Osing sebagai masyarakat asli Banyuwangi yang berkembang di awal abad 20 (Margana, 2015). Setelah peristiwa kekerasan yang terjadi pada tahun 1998-1999, stigma terhadap santet Banyuwangi semakin menguat. Menurut penelitian literatur saat ini, seperti yang dikemukakan oleh Masruri (1999) dan Herriman (2006) bahwa, peristiwa tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai ledakan serangan terhadap ilmu hitam, sebaliknya, mereka dapat dipahami sebagai perpaduan antara ketakutan sosial, rumor, stigmatisasi, lemahnya kekuasaan, dan krisis politik selama masa transisi Reformasi (Masruri, 1999; Herriman, 2006). Oleh karena itu, tragedi yang terjadi pada tahun 1998 menjadi momen penting yang mengubah santet dari tradisi menjadi tuduhan yang mematikan.

Meskipun sebagian besar penelitian telah membahas santet Banyuwangi sebagai praktik budaya, rumor sosial, dan kekerasan politik. Namun, belum ada penelitian yang menggabungkan aspek budaya, stigma, dan ingatan kekerasan dalam konteks sejarah kebudayaan. Berangkat dari perbedaan ini, studi ini mengajukan dua pertanyaan utama: 1) Bagaimana kesaktian dan ilmu santet *wong Osing* sebagai bagian dari sejarah kebudayaan di Banyuwangi?; 2) Bagaimana tragedi pembantaian terduga penganut santet dan perburuan ninja menguatkan stigma terhadap masyarakat Banyuwangi pasca-Reformasi 1998?

Penelitian ini merupakan studi sejarah yang menggunakan metode sejarah yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa pasca-pembantaian terduga penganut santet dan perburuan ninja di Banyuwangi menguatkan akar stigma terhadap masyarakat Banyuwangi pasca-Reformasi 1998. Metode sejarah menekankan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek budaya, sosial, dan mentalitas masyarakat. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan metodologi sejarah sosial-budaya untuk menggali paradoks santet, antara stigma yang mengakar akibat trauma 1998 dengan santet sebagai praktik budaya pemikat dan ilmu gaib bagi masyarakat Osing. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya merekonstruksi narasi historis yang tidak hanya deskriptif, melainkan juga interpretatif terhadap dinamika kekuasaan, identitas, dan memori kolektif pasca-Reformasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengungkap fakta-fakta dan realitas secara kronologis, guna menghindari anakronisme. Langkah-langkah metode sejarah yang diperlukan adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metodologi sosial dan budaya digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, guna mengkaji secara kronologis dan komprehensif. Langkah pertama adalah heuristik dengan mengumpulkan beberapa sumber primer seperti arsip keputusan, arsip korban kekerasan budaya, surat kabar resmi seperti kompas dan jawa pos yang memberitakan peristiwa kekerasan budaya terhadap terduga penganut ilmu santet. Selanjutnya, penggunaan sumber sekunder di antaranya artikel dan buku sebagai penunjang dalam membaca peristiwa huru-hara isu santet dan ninja sebagai penguat stigma kebudayaan pasca-Reformasi.

Langkah kedua adalah kritik untuk mendedah objektivitas terkait relevansinya dalam kerangka metodologi sosial dan budaya penelitian ini dalam kurun waktu pasca-Reformasi. Sehingga, teknik analisis data penelitian ini adalah secara kualitatif. Langkah ketiga adalah interpretasi dalam menyusun kerangka berpikir penelitian ini sebagai sejarah sosial-budaya dalam memvalidasi data dan sumber yang didapatkan sebelumnya. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa, metodologi sosial-budaya digunakan untuk mengkonsepkan sejarah perkembangan budaya dan mentalitas masyarakat pendukungnya dalam suatu periode (Kuntowijoyo, 2003). Langkah keempat adalah historiografi, di mana sebagai tahap menyusun penelitian ini menjadi karya sejarah kebudayaan yang kronologis dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Ilmu Santet Wong Osing Sebagai Bagian dari Sejarah Kebudayaan di Banyuwangi*

Dalam budaya Osing, santet tidak selalu dianggap semata-mata sebagai ilmu hitam yang menghancurkan, tetapi sebagai bagian dari pengetahuan lokal yang sering dikaitkan dengan pengasihan, perlindungan, pengobatan, dan hubungan sosial sejak masa Kerajaan Blambangan abad ke-18 (Ali, 2002). Ilmu santet dan kesaktian *wong Osing* menjadi bagian yang melekat dalam spiritual keyakinan agama Hindu masyarakatnya. Meski, pasca peristiwa Puputan Bayu tahun 1772, ada upaya islamisasi untuk memudahkan segala sesuatu pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan substansi terhadap kepercayaan sebelumnya. Bahkan, lebih jauh lagi islamisasi dibaca sebagai upaya memutus kekerabatan dengan Kerajaan Hindu di Bali (Margana, 2012).

VOC menyadari wilayah Blambangan dan seluruh kekuatan rakyatnya menjadi benteng pertahanan terakhir dari kerajaan Hindu di Bali. VOC melakukan usaha Islamisasi untuk memutus tali kekerabatan dengan Bali. Pada sisi yang lain, usaha VOC ini dinilai mensukseskan cita-cita Mataram dalam menyebarkan Islam di Banyuwangi. Perubahan politik yang terjadi setelah Puputan Bayu dianggap sebagai momentum dari proses Islamisasi, yang terkait erat dengan intervensi kolonial dan reorganisasi kekuasaan di Blambangan (Margana, 2015). Namun, proses ini tidak segera menghapus budaya lokal dari masyarakat Osing.

Ketidakmapanan Blambangan mempertahankan posisinya sebagai kerajaan Hindu terakhir di Jawa membuat Islamisasi dilakukan melalui usaha politik VOC. Pasca peristiwa Puputan Bayu di tahun 1772, VOC mengangkat Mas Alit yang memiliki latar belakang beragama Islam sebagai bupati pertama dan memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya di Ulu Pang Pang menuju Banyuwangi (Ali, 2002). Mas Alit juga merubah sistem pemerintahan dari Kerajaan Blambangan menjadi Kadipaten Banyuwangi. Secara bertahap, kondisi tersebut membuat Islam semakin kokoh di Banyuwangi. Meski, agama Islam mulai berkembang, realitasnya masyarakat Banyuwangi masih mewarisi substansi spiritualitas dan kebudayaan agama Hindu. Kebudayaan dan spiritualitas tersebut termanifestasikan dalam ilmu santet Banyuwangi.

Dalam cerita dan tradisi lokal tertentu, santet dianggap tidak hanya sebagai cara mencelakai, tetapi juga sebagai bagian dari kebiasaan pengasihan dan membangun hubungan sosial. Oleh karena itu, fungsi santet dalam kebudayaan Banyuwangi harus dilihat sebagai spektrum makna daripada satu kategori (Saputra, 2001). Identitas santet kemudian bertalian dengan identifikasi identitas Osing sebagai masyarakat asli Banyuwangi. Identifikasi identitas Osing berkembang di awal abad 20 (Margana, 2015). Identifikasi dilakukan oleh sarjana-sarjana Belanda untuk membedakan masyarakat Jawa dengan masyarakat asli Banyuwangi. J. Scholte mengemukakan, masyarakat asli Banyuwangi mendapat stigma dari etnis lain sebagai masyarakat buangan tidak berkasta, pinggir, dan tidak setia (Scholte, 1927). Identifikasi identitas Osing oleh etnis Jawa sebagai orang buangan atau *tiyang pinggir* kemudian diproduksi dalam pertunjukan wayang wong sebagai *wong Osing* atau tokoh *asu pesing* yang memberontak (Margana, 2015). Dalam situasi ini, stigma terhadap santet tidak hanya berkaitan dengan praktik gaib, tetapi juga berperan dalam pembentukan identitas sosial Banyuwangi.

Usaha dalam memproduksi stigma ini berkaitan dalam prasangka etnis Jawa terhadap masyarakat asli Banyuwangi sebagai kelompok pemberontak. Stigma sebagai kelompok pemberontak ini berkaitan dengan kegagalan Mataram dalam mengislamkan Blambangan di tahun 1639 (Margana, 2015). Menurut Lekkerkerker, kegagalan Mataram ini dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat Osing yang memiliki kesaktian tinggi (Lekkerkerker, 1926). *Wong-wong Osing* yang ditangkap oleh Mataram dijadikan budak dan tawanan perang. Mataram kemudian mengidentifikasi *wong Osing* sebagai *tiyang pinggir*. Van Der Tuuk juga mengasumsikan *tiyang pinggir* adalah orang-orang Blambangan yang menjadi tawanan budak (Tuuk, 1880).

Identifikasi *tiyang pinggir* disematkan kepada kekerabatan budak perempuan, sedangkan kekerabatan budak laki-laki dilabeli *tiyang gani* yang dimanfaatkan menjadi *coban* atau semacam uji keampuhan pusaka. Mereka ini yang disebut sebagai budak Blambangan atau juga disebut *tiyang pinggir*. Ciri-ciri fisik *tiyang pinggir* dijelaskan memiliki tanda sobek kuku ibu jarinya, mempunyai puser di telapak tangan, dan mempunyai asi yang warnanya kehitaman atau semu wulung (Margana, 2015). Keampuhan dari asi perempuan-perempuan *Osing* ini dijadikan sebagai budak penyusu bayi-bayi anggota keluarga keraton Mataram.

Selanjutnya, pelabelan *wong Osing* dikisahkan melalui mitos kekeramatan sebagai prajurit Blambangan yang diunggulkan. Kisah tersebut ditulis oleh Purwasastra yang merupakan bangsawan Jawa-Muslim dalam pupuh Babad Blambangan (Partaningrat, 1995). Susunan kronik Blambangan tersebut adalah titah dari Bupati Banger Jayalelana yang ditulis antara tahun 1773-1774, tepatnya pasca berakhirnya perjuangan Jagapati yang merupakan pangeran terakhir Blambangan di tahun 1771-1772, dan lima tahun pasca perlawanan Agung Wilis terhadap VOC (Margana, 2015). Hal ini mengindikasikan adanya pengakuan terkait kesaktian, keberanian, keunggulan, dan kekeramatan dari *wong Osing*.

Kisah kesaktian *wong Osing* semakin berkembang di abad 20. Pada tahun 1935 (**Gambar 1**), Tan Boen Soan yang merupakan etnis Tionghoa menulis roman mengenai *tiyang pinggir seganten* yang berjudul *Digdaja* dalam Majalah Penghidoepan yang mengisahkan *wong Osing* sebagai pemberi asi bagi anak-anak raja Mataram (Soan, 1935). Pada tahun 1936 (**Gambar 2**) terbit sekuel dari roman sebelumnya berjudul *Tjoban* yang juga diterbitkan Majalah Penghidoepan (Soan, 1936). Kisah mengenai *tiyang pinggir* tersebut turut membangun persepsi atas kekeramatan *wong-wong Osing*. Novel *Digdaja* dan *Tjoban* sangat berpengaruh dalam membangun narasi kesaktian dan keampuhan yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Banyuwangi. Dalam situasi seperti ini, karya sastra seperti roman *Digdaja* dan *Tjoban* dapat dibaca bukan semata-mata sebagai representasi fakta kehidupan nyata, tetapi juga sebagai representasi diskursif yang menggambarkan *wong Osing* sebagai kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh mistik, kekuatan gaib, dan perbedaan dengan kelompok etnis lain.

Pada perkembangan selanjutnya, stigma dan prasangka terhadap kesaktian *wong Osing* telah mengakar kuat dalam sejarah identitas Banyuwangi. Stigma dan prasangka tersebut kemudian mengerucut pada pengakuan etnis lain yang mengidentifikasi masyarakat Banyuwangi sebagai penganut kuat kesaktian ilmu santet. Pada periode selanjutnya, stigma ini semakin menguat pasca peristiwa politik di tahun 1998 (Masruri, 1999).

Secara historis, santet lahir dari konteks resistensi budaya terhadap penjajahan. Pasca-Puputan Bayu (1771-1772), ketika rakyat Blambangan melawan kolonial Belanda, Kerajaan Mataram, serta Bali, para penyintas bersembunyi di hutan-hutan pegunungan. Dalam situasi tersebut, ilmu gaib menjadi senjata non-fisik untuk mempertahankan kelompok dan endogami (perkawinan sesuku) (Saputra, 2007). Santet digunakan sebagai ilmu pengasih untuk menjaga ikatan persaudaraan internal komunitas agar tidak larut ke dalam pengaruh luar. Etimologi lokal mendukung pemahaman ini, di mana santet diistilahkan menjadi *mesisan banthet* (sekalian rusak) atau *mesisan gancet* (sekalian bergabung), yang menggambarkan penyatuan dua sisi yang bisa merusak, sekaligus menyatukan hubungan manusia.



**Gambar 1.** Novel Digdaja  
 (Sumber: Majalah Penghidoe Pan, 1935)



**Gambar 2.** Novel Tjaban  
 (Sumber: Majalah Penghidoe Pan, 1936)

Dalam klasifikasi dan praktek ilmunya, santet dibagi menjadi empat warna aura yang berkelindan. Pertama, santet hitam adalah ilmu *pangiwa*, yang dikhususkan untuk mencelakai orang lain (Saputra, 2001). Praktek santet hitam terdiri dari *cekak*, *sebul/suwuk*, *cekek*, *bantal nyowo*, dan *bantal kancing* (Fendi, 2023). Kedua, santet kuning terdiri dari *si gandrung mangu-mangu*, *prabu kenya*, *puter giling*, *damar wulan*, *semar mesem*, *sabuk mangir*, *si kumbang jati*, dan *tes putih tes abang* (Fendi, 2023). Secara garis besar, santet kuning adalah ilmu pengasihian, yang ditujukan untuk meningkatkan wibawa dan menarik perhatian orang lain (Saputra, 2001). Ketiga, santet merah yang hampir sama dengan santet kuning, namun efeknya lebih berat (Saputra, 2001). Santet merah biasanya digunakan secara khusus untuk mengincar seseorang. Santet merah terdiri dari *jaran goyang*, *siti jenar*, *semut gatel*, *bantal guling*, *gombal kobong*, dan *polong dara* (Fendi, 2023). Keempat, santet putih yang dipakai untuk menyembuhkan korban ketiga santet sebelumnya (Saputra, 2001).

Ilmu santet dalam kebudayaan masyarakat Osing tidak digunakan sembarangan. Santet kuning umum digunakan oleh orang yang memerlukan perhatian banyak orang lain, seperti pemimpin, penari, dan sebagainya (Fendi, 2023). Santet merah umum digunakan oleh seseorang yang ditujukan khusus kepada lawan jenis yang akan dinikahinya (Fendi, 2023). Dalam budaya masyarakat Osing, ilmu santet dimasukkan ke dalam kategori ilmu pengasihian. Namun, pasca peristiwa 1998, paradigma yang berkembang menjadikan ilmu santet mengalami pergeseran makna, menjadi ilmu yang dikhususkan untuk mencelakai orang lain (Herriman, 2016).

### **Tragedi Pembantaian Penganut Santet dan Perburuan Ninja Sebagai Penguat Stigma Pasca-Reformasi 1998**

Sebelum terjadinya peristiwa aksi massa dan kekerasan terhadap orang-orang yang menjadi korban kambing hitam pembantaian penganut santet, telah terjadi aksi-aksi massa berupa penjarahan toko-toko sebagai efek domino peristiwa politik nasional di Banyuwangi tahun 1998. Masyarakat Kecamatan Purwoharjo dan Genteng melakukan aksi unjuk rasa sebagai respon tuntutan atas aksi massa daerah untuk mendesak lengsernya Pemerintah Orde Baru yang terjadi di Jakarta (Kusairi, 2015). Puncaknya, pada tanggal 15 Januari 1998, aksi massa menyebabkan kerusuhan dengan aparat satuan pengamanan di Kecamatan Purwoharjo (Kompas, 1998c). Pada tanggal 16 Januari 1998, toko pertanian milik Suningsih dijarah massa sebagai rentetan kasus yang terjadi di Kecamatan Purwoharjo (Jawa Pos, 1998g). Pada tanggal 17 Januari 1998 juga terjadi penjarahan toko sembako di Kecamatan Rogojampi dan Srono (Kompas, 1998g). Rentetan peristiwa aksi massa tersebut menandai tahun 1998 sebagai periode huru-hara di Banyuwangi. Karena, pada

bulan-bulan berikutnya terjadi serentetan peristiwa kelam lanjutan yang mengganggu ketenangan masyarakat Banyuwangi.

Pada tanggal 4 Februari 1998 terjadi kasus penghilangan nyawa kepada Soemarmo Adi, seorang petani Kecamatan Genteng yang dituduh kerabatnya sendiri sebagai pelaku ilmu santet (Sumaatmadja, Wardhana, Abdul Manan, 2001). Pada tanggal 5 Februari 1998, seorang warga Kecamatan Banyuwangi, bernama Asmaki menjadi korban pembunuhan atas tuduhan pelaku ilmu santet oleh sesama warga kampungnya sendiri (Sumaatmadja, Wardhana, Abdul Manan, 2001). Bukannya langsung berperan mengatasi masalah di lapangan, Bupati Banyuwangi, Purnomo Sidik justru merespon peristiwa isu penganut santet dengan mengeluarkan Radiogram bernomor 300/70/439.013/98 pada tanggal 6 Februari 1998, yang isinya terkait instruksi pendataan orang-orang yang diduga sebagai pemilik ilmu santet untuk diamankan di tiap wilayah kecamatan (Jawa Pos, 1998e).

Instruksi radiogram tersebut segera menyebar ke seluruh kepala kecamatan dan kepala polsek di Banyuwangi. Akan tetapi, data dari hasil pendataan yang dilakukan kepala kecamatan dan kepala polsek di seluruh wilayah Banyuwangi justru bocor secara diam-diam kepada orang-orang yang tidak diketahui identitasnya (Cribb, 2002). Kebocoran data identitas ini yang diduga sebagai penyebab gelombang pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang terduga pemilik ilmu santet di Banyuwangi pada Bulan Juni-Oktober 1998 (Kusairi, 2015). Meskipun hubungan kausalnya tidak dapat direduksi ke dalam satu faktor karena peristiwa ini juga dipengaruhi oleh rumor, ketakutan sosial, dan krisis otoritas selama masa transisi Reformasi, bocoran data pendataan terduga pemilik ilmu santet diduga berkontribusi pada peningkatan kekerasan.

Isu santet kemudian justru baru menjadi isu panas di wilayah tapal kuda, sejak awal Bulan Juni 1998, tepatnya pasca lengsernya Pemerintah Orde Baru. Bermula dari terbunuhnya 40 orang yang dituduh sebagai pencuri yang memiliki ilmu kesaktian di Jember pada tanggal 10 Juni 1998 (Kompas, 1998a). Pada tanggal 28 Juni sebanyak tujuh orang menjadi korban tuduhan pelaku santet di Lumajang (Kompas, 1998b). Peristiwa kekerasan atas nama isu santet yang terjadi di Lumajang dan Jember menjadi pemantik merebaknya peristiwa serupa di Banyuwangi.

Peristiwa aksi massa dengan isu santet di Banyuwangi tidak terlepas dari eskalasi politik nasional. Pada kasus Banyuwangi, isu santet dilatarbelakangi oleh berbagai masalah, seperti dendam, perebutan tanah warisan, hingga aksi teror secara acak (Herriman, 2007). Adanya isu santet menyebabkan keresahan tersendiri bagi masyarakat Banyuwangi atas tindakan saling main hakim sendiri kepada orang yang dituduh sebagai terduga pelaku ilmu santet.

Pada tanggal 11 Juli 1998, terjadi kekerasan oleh massa yang menuduh Suhaimi, seorang warga Kecamatan Singojuruh yang berprofesi sebagai dukun pijat dituduh pelaku ilmu hitam (Kompas, 1998d). Pada bulan Agustus 1998, 14 orang menjadi korban pembunuhan atas tuduhan pelaku ilmu santet di Kecamatan Kabat, Songgon, dan Rogojampi (Ulama, 1998). Menanggapi semakin banyaknya korban jiwa sebagai terduga pemilik ilmu santet, Bupati Purnomo Sidik mengeluarkan radiogram kedua pada tanggal 16 September 1998, yang isinya instruksi penyelamatan terhadap sisa-sisa orang yang sebelumnya didata sebagai pemilik ilmu santet (Cribb, 2002). Akan tetapi, aksi massa dan pembunuhan sepihak terhadap orang-orang terduga pemilik ilmu santet semakin tidak terbendung.

Berdasarkan laporan surat kabar Jawa Pos, hingga Bulan Oktober 1998, jumlah korban pembunuhan atas isu penganut santet mencapai 111 orang yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kecamatan Banyuwangi (Jawa Pos, 1998c). Namun, bergantung pada cakupan waktu dan jenis sumber yang digunakan, jumlah total korban dalam penelitian-penelitian berikutnya berkisar dari 147 hingga lebih dari 194 (Kusairi, Dhanang Respati Puguh, Yety Rocwulaningsih, 2025). Banyaknya korban jiwa yang terjadi di Banyuwangi, mengundang perhatian tokoh-tokoh nasional, seperti Gus Dur dan Wiranto yang kemudian menyambangi dan mendesak dibentuknya tim pencari fakta independen di Banyuwangi pada tanggal 6 Oktober 1998 (Jawa Pos, 1998d). Hal yang membuat mencekam peristiwa huru-hara di Banyuwangi adalah aksi teror secara acak yang ditunggangi oleh pihak luar yang diisukan memiliki kepentingan tertentu.

Pada tanggal 9 Oktober 1998, Kapolres Banyuwangi, Eddy Murdiyoko menetapkan 15 orang sebagai terduga pelaku pembantaian warga yang dituduh sebagai pelaku ilmu santet. Kelima belas pelaku tersebut mengaku jikalau mereka mendapat perintah misterius dan diberi imbalan selama menciptakan huru-hara isu penganut santet (Jawa Pos, 1998b).

Pasca ditangkapnya terduga pelaku pembantaian, menguatkan kecurigaan masyarakat selama ini, bahwa isu santet merupakan aksi teror yang membabi buta dan ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas terjadinya kekerasan ini. Menurut Hasan Ali dalam wawancara Kompas menyatakan bahwa, suatu keanehan apabila melihat pola pembunuhan di berbagai kecamatan yang tidak sesuai dengan latar belakang masyarakat Osing yang dikambing hitamkan sebagai pelaku penganut ilmu santet sesungguhnya (Kompas, 1998h). Kecamatan-kecamatan yang menjadi kantong hunian masyarakat Osing, seperti Kecamatan Kabat, Giri, dan Glagah justru yang paling sedikit korbannya. Pada sisi yang lain, teror pembunuhan tidak lagi menasar orang yang mendalami ilmu santet, tetapi merebak kepada tokoh-tokoh agama seperti kiai dan ustaz desa (Kompas, 1998h).

Pada gilirannya, isu santet berubah menjadi isu ninja, sebagai pelaku teror yang meresahkan warga. Situasi ini membuat warga melakukan siskamling rutin yang dimulai pukul 19.00 WIB malam (Kedaulatan Rakyat, 1998). Isu yang beredar di masyarakat, menyeruakkan bahwa ninja sebagai terduga pelaku kekerasan yang memiliki kesaktian spiritual, karena datang dan menghilang secara cepat. Isu ninja semakin menyebar sebagai pelaku teror yang pada siang harinya berkamufase menjadi gelandangan. Karena, dalam bulan yang sama, tiba-tiba muncul banyak gelandangan yang berkeliaran di wilayah Banyuwangi (Jawa Pos, 1998f). Ketika ditangkap oleh warga dan coba diinterogasi, gelandangan-gelandangan ini tidak mau menyebutkan namanya dan tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya. Hal ini semakin menguatkan kecurigaan masyarakat terkait hubungan merebaknya gelandangan yang berkeliaran dengan isu ninja yang sedang terjadi.

Akan tetapi, masyarakat juga tidak bisa menghakimi gelandangan ini, karena mereka takut apabila terbukti benar, kemudian menjadi korban pembalasan teror sebagaimana yang terjadi pada isu santet sebelumnya, sehingga masyarakat memilih menyerahkan para gelandangan ini kepada pihak kepolisian (Muzadi, 1998). Perubahan isu santet menjadi isu ninja menunjukkan pergeseran dari tuduhan terhadap figur-figur lokal menuju kepanikan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, ninja tidak hanya hadir sebagai pelaku teror dalam pengertian literal, tetapi juga sebagai simbol ketidakpastian, rumor, dan ketakutan kolektif yang diproduksi melalui interaksi antara komunikasi lisan warga dan pemberitaan media massa (Herriman, 2010).

Serentetan peristiwa isu santet dan ninja juga menyebabkan penggiringan opini publik bahwa, dalang dibalik semua peristiwa ini adalah Bupati Purnomo Sidik sendiri, karena bocornya identitas pemilik ilmu santet yang sebelumnya didata setelah keluarnya instruksi radiogram pertama penuh kesengajaan (Jawa Pos, 1998a). Bupati Purnomo Sidik lantas menepis tuduhan tersebut dengan wawancara klarifikasi kepada wartawan Jawa Pos bahwa dirinya siap dicopot apabila terbukti bersalah.

Investigasi kepolisian terhadap pelaku isu santet dan teror ninja masih berlangsung selama Bulan Oktober 1998. Pada sisi yang lain, Bupati Purnomo Sidik justru memaksa tiap Kepala Kecamatan untuk melakukan pendataan ulang terhadap orang-orang yang terduga sebagai pemilik ilmu santet (Kompas, 1998e). Hal ini justru membuat opini publik yang sebelumnya menyatakan bahwa, Bupati Purnomo Sidik sebagai dalang dibalik ini semua mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerahnya. Pasca klarifikasi wawancara yang dilakukan Bupati Purnomo Sidik kepada wartawan Jawa Pos, isu santet dan ninja mulai mereda di Bulan November 1998, sedangkan penyelidikan oleh pihak kepolisian masih terus berlangsung di bulan yang sama (Kompas, 1998f).

Sejak tanggal 1 Februari 1999 terjadi serangkaian aksi unjuk rasa dari berbagai kalangan yang dikomandoi oleh Kelompok Ulama 101 dengan tuntutan supaya Bupati Purnomo Sidik turun dari jabatannya paling lambat 10 Februari 1999 (Kompas, 1999a). Akan tetapi, hingga tanggal 11

Februari 1999, Bupati Purnomo Sidik mengabaikan tuntutan tersebut dan enggan melepaskan posisi jabatannya sebagai kepala daerah tingkat II (Sumaatmadja, Wardhana, Abdul Manan, 2001).

Gelombang unjuk rasa terus berlanjut dengan tuntutan yang sama hampir setiap harinya selama Bulan Februari 1999. Semakin meluasnya tuntutan kepada bupati dan adanya ketegangan yang memanas, akhirnya pada tanggal 25 Maret 1999 Bupati Purnomo Sidik dimediasi menemui perwakilan Kelompok Ulama 101 oleh Kapolres Eddy Murdiyoko yang menghasilkan kesepakatan bahwa, bupati akan mundur dari jabatannya paling lambat tanggal 10 Mei 1999 (Kompas, 1999b). Pada tanggal 12 Mei 1999, bupati menyerahkan wewenang pemerintahan daerah tingkat II kepada pemerintah daerah tingkat I, yang berarti Bupati Purnomo Sidik mengundurkan diri secara resmi (Herriman, 2007).

Isu santet dan ninja dibaca sebagai pertarungan politik lokal yang mengorbankan banyak masyarakat dengan mengkambinghitamkan kebudayaan santet bagi masyarakat Osing, Banyuwangi. Pasca reformasi, terjadi banyak upaya untuk mendekonstruksi kembali kehidupan sosial, budaya, dan administratif di berbagai daerah (Franz & Kebeer von Benda Beckmann, 2007). Pada sisi yang lain, isu santet dan ninja dibaca sebagai reaksi lanjutan atas keresahan sosial yang disebabkan terpuruknya perekonomian masyarakat pasca-Reformasi.

Akan tetapi, sangat disayangkan apabila yang menjadi korban kemudian masyarakat dan kebudayaan santet yang di stigma buruk oleh masyarakat luas atas dampak tragedi yang ditimbulkan. Padahal, santet merupakan kebudayaan dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Osing (Beatty, 1999). Selaras dengan kerangka stigma Erving Goffman, santet dipahami sebagai subkultur untuk mendiskreditkan kebudayaan masyarakat Osing sebagai paradigma yang menyimpang dengan diperparah atas peristiwa kekerasan terhadap terduga pelaku santet yang mencekam pasca-Reformasi 1998 (Goffman, 1963).

Stigma tersebut berlaku dengan adanya proses pelabelan untuk menuduh terduga pelaku santet yang sebetulnya tidak dapat dibuktikan selama dan pasca-proses hukum yang dijalankan. Sehingga, muncullah stereotipisasi sebelah mata terhadap masyarakat Osing pasca-peristiwa tersebut oleh masyarakat luar Banyuwangi. Lambat laun, masyarakat Banyuwangi sendiri turut meyakini santet dalam kacamata stigma dan rasa malu yang disematkan. Lebih lanjut lagi Erving Goffman menyimpulkan sebagai eksklusi sosial yang berpotensi mengucilkan masyarakat Osing dari relasi sosialnya (Goffman, 1963). Akibatnya, masyarakat-masyarakat pedesaan yang menjadi kantong hunian masyarakat Osing semakin menutup diri, tetapi masih menjalankan santet secara diam-diam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi ini, stigma ini menjadi alat untuk menyederhanakan ketakutan kolektif terhadap kebudayaan santet di kehidupan sehari-hari.

Isu merebaknya santet dan kekerasan yang mengikutinya selama periode 1998 memang mengakibatkan masalah santet sebagai bagian dari kebudayaan tidak bisa diselesaikan secara kebudayaan. Santet yang sebetulnya telah mengakar kuat sebagai bagian kebudayaan masyarakat Osing sejak lama harus dibenturkan dengan masalah agama yang mengkristal pada kontestasi elit politik daerah. Itulah yang menyebabkan terjadi pergeseran makna menjadi stigma atas kekhasan kebudayaan Osing, Banyuwangi. Padahal, apabila dipelajari secara mendalam, santet sebagai ilmu memiliki empat warna aura yang tidak bisa disimpulkan sebagai kebudayaan yang keliru. Meminjam pendapat Maurice Halbwachs, bagi masyarakat Osing santet menjadi pengetahuan tradisional yang diwariskan dalam memori kolektif kehidupan sehari-hari lintas generasi (Halbwachs, 1992). Santet dapat menjadi alat legitimasi adat. Pelaku atau pawang santet menjadi mediator yang mengharmonisasi komunitas Osing di pedesaan. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap praktek santet telah mengakar sebagai kebudayaan lokal dan pelaku atau pawang santet membentuk kerangka berpikir sebagai pemeran utama dalam realitas sosial masyarakat pedesaan.

Lebih lanjut lagi berdasarkan kerangka teori memori kolektif Maurice Halbwachs, ketika terjadi peristiwa kekerasan 1998 atas isu terduga pelaku santet, memori kolektif atas praktek kebudayaan santet digunakan sebagai dasar legitimasi tindakan genosida yang dikomandoi pelaku ninja (Halbwachs, 1992). Artinya, kekerasan terhadap terduga pelaku santet tidak muncul tiba-tiba,

tetapi berakar pada ingatan budaya yang sudah mengakar lama. Kondisi ini berpotensi melahirkan trauma ketakutan atas memori kolektif masyarakat pasca-Reformasi 1998.

Apabila dianalisis lebih lanjut, kekerasan terhadap terduga pelaku santet dan kelompok ninja memiliki pola terstruktur. Selaras dengan kerangka *cultural violence* Johan Galtung santet sebagai produk budaya dan kesaktian *wong Osing* sebagai produk pengetahuan memori kolektif digunakan sebagai legitimasi kekerasan baik secara fisik dan struktural dalam kelompok sosial masyarakat Osing (Galtung, 1996). Jika melihat pola dan struktur kekerasan yang terjadi, menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar tentang apakah kekerasan terhadap terduga pelaku santet dan isu kelompok ninja murni sebuah kekerasan atau penolakan atas suatu produk budaya atau sebetulnya aksi kekerasan yang telah direncanakan secara matang untuk menghilangkan nyawa orang-orang tertentu.

Paradigma santet yang di stigma sebagai faktor utama untuk membunuh melalui ilmu magis diselesaikan dengan kekerasan massa tanpa arah untuk menghakimi terduga penganut ilmu ini. Paradigma ini digunakan sebagai alasan melegalkan tindakan massa atas kerusuhan sosial yang terjadi untuk mengkambinghitamkan praktek kebudayaan santet dan ilmu kesaktian *wong Osing* sebagai penyebabnya. Pada gilirannya, situasi ini melahirkan trauma sebagaimana yang dibahas sebelumnya yang berpotensi melemahkan dan memudahkan kebudayaan santet milik masyarakat Osing, Banyuwangi. Santet bukan lagi menjadi identitas kebudayaan, tetapi menjadi simbol kekerasan yang menurut Taufik Abdullah sebagai *vigilantisme* sesat (Abdullah, 2001). Sehingga, tidak mengherankan jika terjadi perubahan pola kekerasan yang berawal dari isu terduga pelaku santet menjadi perburuan kelompok ninja oleh masyarakat yang sama, karena santet sebagai kebudayaan lokal kemudian dikesampingkan dan berubah menjadi kekerasan yang menyengol kelompok agama dan adanya dugaan agenda kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, merujuk kembali kerangka *cultural violence* Johan Galtung, pola kekerasan ini bukan disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi adanya faktor lain yang memperkeruh massa di lapangan, sehingga menyebabkan implikasi lain di luar substansi kekerasan kebudayaan, seperti ekonomi dan politik.

Pada sisi yang lain, pasca-Reformasi, turut adanya upaya-upaya untuk menyemaikan kembali santet sebagai kebudayaan Osing yang patut dibanggakan dan memudahkan stigma yang terlanjur melekat oleh budayawan-budayawan Banyuwangi, seperti Hasnan Singodimayan. Pada tahun 2003, Hasnan Singodimayan berupaya memudahkan stigma melalui karya novel yang berjudul *Kerudung Santet Gandrung*. Novel tersebut sebagai upaya liyan dalam memberikan pemahaman secara mendalam terhadap makna dan kebutuhan kebudayaan santet kepada masyarakat luas (Singodimayan, 2003). Novel ini merepresentasikan santet bukan sebagai ancaman, melainkan hegemoni budaya Osing yang hidup dalam narasi sehari-hari.

Upaya penghapusan stigma dan rehabilitasi kebudayaan santet terus dilakukan selama Pasca-Reformasi. Meski, sebagian masyarakat masih menyematkan santet sebagai kebudayaan yang distigmatisasi, tetapi sebagian masyarakat yang lain, khususnya masyarakat asli Osing memahami kekeliruan stigma dan tuduhan tersebut.

## PENUTUP

Kekerasan kolektif dan politisasi budaya atas peristiwa santet Banyuwangi 1998 bukan semata-mata ledakan irasional masyarakat terhadap praktek kebudayaan, melainkan manifestasi dari krisis transisi kekuasaan pasca-Reformasi. Tuduhan ilmu santet yang awalnya bersumber dari kebudayaan lokal masyarakat Osing dengan cepat berubah menjadi senjata untuk menyelesaikan konflik pribadi, perebutan pengaruh, hingga kepentingan elit daerah. Komnas HAM telah menyimpulkan peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat yang bersifat sistematis dan meluas, dengan korban mencapai ratusan jiwa. Polarisasi serangan oleh terduga pelaku ninja atas rentetan kasus pembunuhan terhadap terduga penganut ilmu santet merembet dampaknya kepada masyarakat yang sama sekali tidak berhubungan dengan penganut ilmu ini, seperti kiai dan ustaz-ustaz desa. Isu santet menjadi kedok untuk memecah belah masyarakat Banyuwangi dengan mengkambinghitamkan kebudayaan santet dan kesaktian *wong Osing*.

Pasca-Reformasi 1998, pertarungan antara stigma dan budaya berlanjut dalam bentuk yang berbeda. Meski peristiwa sejarahnya telah usai, trauma kolektif tetap hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjelaskan isu santet dan kelompok ninja bukan sekadar peristiwa penghakiman terhadap orang-orang penganut ilmu santet yang mengkhawatirkan. Peristiwa tersebut bukan sekadar kekerasan sosial biasa, tetapi sebuah kekerasan kebudayaan yang memberikan dampak pelabelan stigma yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat Banyuwangi hingga dewasa ini. Stigma dan olok-olok terus direproduksi oleh masyarakat liyan Banyuwangi, sedangkan masyarakat Banyuwangi sendiri tidak bisa benar-benar melepaskan substansi ilmu kesaktian dalam kehidupan kebudayaannya. Meski demikian, olok-olok dan pelabelan stigma juga dipandang dapat menjadi pertahanan sosial dan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kacamata kebudayaan, masyarakat Banyuwangi dihormati sebagai pewaris dari kesaktian dan kebudayaan santetnya. Maka, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi alternatif untuk memberikan pemahaman atas akar dan posisi kebudayaan santet bagi masyarakat Banyuwangi, termasuk memberikan penjelasan dari kacamata liyan atas kompleksitas peristiwa sejarah kelam yang mengatasnamakan kekerasan sosial yang memberikan dampak kekerasan kebudayaan santet yang tidak kunjung selesai.

Sejauh ini, belum ada upaya konkret dalam rehabilitasi kebudayaan santet Banyuwangi. Selain itu, belum adanya upaya pemulihan nama terhadap keluarga-keluarga yang menjadi korban kekerasan isu santet di tahun 1998. Stigma telah terlanjur menguat, sedangkan kebudayaan santet yang telah terlanjur mengakar masih berkelindan dalam kehidupan kebudayaan sehari-hari masyarakat, meski secara diam-diam. Melalui penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dalam perlunya upaya untuk memulihkan nama baik orang-orang yang telah menjadi korban kekerasan isu santet di tahun 1998.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2001). *Kerawan Sosial di Tanah Air: Sebuah Refleksi Budaya, Pembangkangan Sipil dan Konflik Vertikal*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Ali, H. (2002). *Sekilas Perang Puputan Bayu*. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Beatty, A. (1999). *Varietas of Javanese Religion: An Antropological Account*. Cambridge University Press.
- Beckmann, F. dan K. von B. (2007). Identitas-Identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-Komunitas Politik Minangkabau. In H. S. N. dan G. van Klinken (Ed.), *Politik Lokal di Indonesia* (pp. 293–326). KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Cribb, R. (2002). *From Petrus to Ninja: Death Squash in Indonesia, dalam B. Campbell, In Death Squash in Global Perspective: Murder With Deniability*. Sant Martin Press.
- Fendi, S. H. (2023). *Jenis-Jenis Ilmu Santet Banyuwangi*. 15 Oktober 2023.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Mean: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Sage.
- Goffman, E. (1963). *Stigma Notes On The Management Of Spoiled Identity*. Simon & Schuster Inc.
- Halbwachs, M. (1992). *On Collective Memory*. The University Chicago Press.
- Halim, A. (2019). Using: Study of Multiculturalism and Identity Politics on Local Islam. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(1), 69–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/mlt.v4i1.69-86>
- Herriman, N. (2006). Fear and Uncertainty: Local Perceptions of the Sorcerer and the State in an Indonesian Witch-Hunt. *Asian Journal of Social Science*, 34(3), 360–387. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/156853106778048669>
- Herriman, N. (2007). Sorcerer Killing in Banyuwangi: A Re-Examination of State Responbility for Violence. *Asian Studies Review*, 21(1), 61–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10357820701196692>
- Herriman, N. (2010). The great rumor mill: Gossip, mass media, and the ninja fear. *Journal of Asian Studies*, 69(3), 723–748. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/s0021911810001488>

- Herriman, N. (2016). *Witch-Hunt and Conspiracy: The 'Ninja Case' in East Java*. NUS Press.
- Jawa Pos. (1998a). Jika Saya Salah, Saya Siap Dicotot. 15 Oktober 1998.
- Jawa Pos. (1998b). Ketika Banyuwangi Menjadi Ladang Pembantaian Tukang Santet (2): Bapak Saya Buruh Tani, Mana Sempat Nyatet. 10 Oktober 1998.
- Jawa Pos. (1998c). Ketika Banyuwangi Menjadi Ladang Pembantaian Tukang Santet (3): Bapak dan Ibu Saya Lehernya Diikat, Diseret Motor, Hingga Tewas. 21 Oktober 1998.
- Jawa Pos. (1998d). Mabes ABRI Kirim Tim Khusus ke Banyuwangi: Operasi Naga Hijau. 6 Oktober 1998.
- Jawa Pos. (1998e). Pembantaian di Jatim Berlanjut. 7 Februari 1998.
- Jawa Pos. (1998f). Soal Isu Santet Banyuwangi. 15 Oktober 1998.
- Jawa Pos. (1998g). Tingkat Keresahan Masyarakat Tinggi. 17 Januari 1998.
- Kedaulatan Rakyat. (1998). Pembunuh Dukun Banyuwangi. 11 Oktober 1998.
- Kompas. (1998a). 40 Orang Terbunuh dengan Isu Pencuri Menggunakan Magis dan Tenung (Santet). 16 Juni 1998.
- Kompas. (1998b). 7 Orang Terbunuh Karena Diisukan Sebagai Tukang Santet. 30 Juni 1998.
- Kompas. (1998c). Banyuwangi Rusuh, Wartawan Jadi Korban. 16 Januari 1998.
- Kompas. (1998d). Dituduh Tukang Santet, Dua Orang Dibunuh. 12 Juli 1998.
- Kompas. (1998e). Pembunuhan Berbau Politik. 24 Oktober 1998.
- Kompas. (1998f). Pengarakan Kepala Ninja Dihentikan Polisi. 21 November 1998.
- Kompas. (1998g). Penjarahan Toko Terjadi di Banyuwangi. 18 Januari 1998.
- Kompas. (1998h). Selidiki Motivasi Daftar Dukun Santet. 10 Oktober 1998.
- Kompas. (1999a). Banyuwangi Sempat Tegang. 12 Februari 1999.
- Kompas. (1999b). Bupati Banyuwangi Akhirnya Mundur. 27 Maret 1999.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
- Kusairi, L. (2015). *Ontran-Ontran Demokrasi Kekerasan Dengan Isu Dukun Santet Di Banyuwangi 1998-1999*. Universitas Gadjah Mada.
- Latif Kusairi, Dhanang Respati Puguh, Y. R. (2025). Shamans, violence, and the reconstruction of memory: Violence surrounding witchcraft accusations in Banyuwangi, 1998-1999. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 11(2), 186–202. [https://doi.org/https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v11i2.10046](https://doi.org/https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v11i2.10046)
- Lekkerkerker, C. G. (1926). *Blambangan Adat Recht*. Indische Gids II.
- Margana, S. (2012). *Ujung Timur Jawa 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan*. Pustaka Ifada.
- Margana, S. (2015). Outsiders and Stigma: Reconstruction of Local Identity in Banyuwangi. In H. S. N. Susan Legene, Bambang Purwanto (Ed.), *Sites, bodies and stories: Imagining Indonesian history* (pp. 290–235). NUS Press.
- Masruri. (1999). *Menguak Isu Santet*. CV Aneka.
- Muzadi, H. (1998). Santet Hanya Sebagai Sumbu. *Majalah Aulia, Edisi 11 Tahun XX*, 11 Oktober 1998.
- Partaningrat, W. A. (1995). *Babad Tanah Blambangan*. Yayasan Bentang Budaya.
- Saputra, H. S. P. (2001). Tradisi Mantra Kelompok Etnik Using di Banyuwangi. *Humaniora*, 13(3), 260–267. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jh.732>
- Saputra, H. S. P. (2007). *Memuja Mantra: Sabuk Mangir dan Jaran Goyang Masyarakat Suku Using Banyuwangi*. LkiS.
- Scholte, J. (1927). Gandroeng van Banjoewangi. *Majalah Djawa: Edisi VII*, 1927.
- Singodimayan, H. (2003). *Kerudung Santet Gandrung*. Desantara Foundation.
- Soan, T. B. (1935). Digdaja. *Penghidoepan Tahun XI No. 128*.
- Soan, T. B. (1936). Tjoban. *Penghidoepan Tahun XI No. 110*.
- Sumaatmadja, Wardhana, M. (2001). *Geger Santet Banyuwangi*. Institut Studi Arus Informasi.
- Tuuk, V. D. (1880). *Woorden van het Banjoewangisch dialect; MS, Oriental Manuscripts*. Department Leiden University Library.



Ulama, N. (1998). *Tim Pencari Fakta Nahdlatul Ulama, daftar korban nomor 22 dalam Kasus Pembunuhan di Banyuwangi.*